

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pengertian pasar modal menurut Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (BAPEPAM-LK) adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif investasi bagi para investor selain investasi lainnya seperti : menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham dan lainnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah pasar modal di Indonesia yang merupakan bursa hasil penggabungan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES) pada 1 Desember 2007. Untuk memberikan informasi yang lebih lengkap tentang perkembangan bursa kepada publik, BEI menyebarkan data pergerakan harga saham melalui media cetak dan elektronik. Satu indikator pergerakan harga saham tersebut adalah indeks harga saham, indeks merupakan salah satu pedoman bagi investor untuk melakukan investasi di pasar modal, khususnya saham. Saat ini, BEI memiliki 12 macam index, yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Indeks Sektoral, Indeks LQ45, Jakarta Islamic Index (JII), Indeks Kompas 100, Indeks Bisnis 27, Indeks Pefindo 25, Indeks SRI-KEHATI, Indeks Papan Utama, Indeks Papan Pengembangan, Indeks Individual, dan IDX 30.

Indeks Sektoral diperkenalkan pada tanggal 2 Januari 1996. Indeks sektoral BEI adalah subindeks dari IHSG. Semua emiten yang tercatat di BEI, yang diberi nama JASICA (*Jakarta Industrial Classification*). Saat ini tercatat ada 7 sektor, yaitu sektor Pertanian, sektor Pertambangan, sektor Properti, Sektor Infrastruktur,

Utilitas, dan Transportasi, sektor Keuangan, sektor Perdagangan dan Jasa, dan sektor Manufaktur (www.idx.co.id). Berikut adalah daftar perusahaan-perusahaan yang tercatat mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2012 digambarkan dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Daftar Perusahaan Yang Tercatat Terlambat Menyampaikan
Laporan keuangan Auditan Yang Berakhir per 31 Desember 2012

No.	Jenis Sektor	Jumlah Perusahaan Tercatat	Jumlah Perusahaan yang Mengalami <i>Audit Delay</i>	Persentase Perusahaan <i>Audit Delay</i>
1.	Pertanian	18	1 perusahaan, yaitu : PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk	5,56
2.	Pertambangan	31	4 perusahaan, yaitu : - PT Atlas Resources Tbk - PT Borneo Lumbang Energi &Metal Tbk - PT Berau Coal Energy Tbk - PT Energi Mega Persada Tbk	12,90

(Bersambung)

Tabel 1.1 (Sambungan)

3.	Manufaktur	139	6 perusahaan, yaitu : - PT. Polychem Indonesia Tbk - PT Davomas Abadi Tbk - PT Prima Alloy Steel Universal Tbk - PT Sierad Produce Tbk - PT Sunson Textile Manufacturer Tbk - PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk	4,31
4.	Properti	43	2Perusahaan, yaitu : - PT Bakrieland Development Tbk - PT Panca Wiratama Sakti Tbk	4,65
5.	Perdagangan	100	3 Perusahaan, yaitu : - PT Dayaindo Resouces International Tbk - PT Modem International Tbk - PT Rimo Catur Lestari Tbk	3

(Bersambung)

Tabel 1.1 (*Sambungan*)

6.	Transportasi	21	7 Perusahaan, yaitu : - PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk - PT Berlian Laju Tanker Tbk - PT Buana Listya Tama Tbk - P T Humpuss Intermoda Transportasi Tbk - PT Steady Safe Tbk - PT Trada Maritime Tbk - PT Zebra Nusantara Tbk	33,33
7.	Konstruksi non Bangunan	6	1 Perusahaan, yaitu: - PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk	16,67

(sumber : www.idx.co.id)

Pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa sektor transportasi adalah sektor yang perusahaannya mengalami paling banyak keterlambatan penyampaian laporan keuangan, dapat dilihat dari banyaknya jumlah perusahaan pada sektor masing-masing, banyaknya perusahaan pada sektor masing-masing yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan, dan juga hasil persentasenya yang menunjukkan bahwa sektor transportasilah yang paling signifikan antara jumlah perusahaan yang tercatat dengan jumlah perusahaan yang mengalami *audit delay*, dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu sebesar 33,33%

dengan jumlah perusahaan yang mengalami *audit delay* sebanyak 7 perusahaan dari 21 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Sektor transportasi berbeda dengan sektor lainnya, secara umum sektor transportasi berfungsi sebagai pendukung pertumbuhan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Sektor transportasi merupakan kegiatan jasa pelayanan. Kelebihan sektor transportasi dibanding sektor lainnya adalah jasa transportasi diperlukan untuk membantu kegiatan sektor lainnya untuk mengangkut barang dan manusia dalam kegiatan pada masing-masing sektor tersebut. Sehingga sektor lainnya akan bergantung pada sektor transportasi sebagai media distribusi kegiatan pada masing-masing sektor, karena bila tidak adanya sektor transportasi maka kegiatan distribusi akan terganggu. Pemerintah ikut serta dalam pendanaan sektor transportasi, tetapi dibutuhkan juga partisipasi dari investor asing untuk menekan biaya pinjaman dan mengimbangi pertumbuhan ekonomi (www.jurnas.com).

1.2 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan. Menurut Kieso (2007:2), laporan keuangan merupakan sarana yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Menurut PSAK No.1 (Revisi 2012: par 09), tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan operasi bisnis dan pertumbuhan investasi pada saat ini, para investor memerlukan lebih banyak informasi yang relevan dan tepat waktu. Menurut Hendriksen dan Van Breda (2007:142), ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam penyajian suatu informasi yang relevan. Informasi akan mempunyai manfaat jika disampaikan tepat waktu kepada para pemakainya untuk

pengambilan keputusan. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi para pembuat keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan, maka informasi yang diberikan akan kehilangan relevansinya. Dengan demikian, informasi dikatakan relevan apabila memiliki nilai prediksi (*predictive value*), nilai umpan balik (*feedback value*) dan tersedia tepat waktu (*timeliness*).

Dalam Febrianty (2011), Kebutuhan akan ketepatan waktu pelaporan keuangan secara jelas telah disebutkan dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan bahwa ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik yang harus dipenuhi agar laporan keuangan yang disajikan relevan untuk pembuat keputusan. Semakin cepat informasi diungkapkan, maka akan semakin relevan informasi tersebut bagi para pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan sangat membutuhkan informasi yang tepat waktu untuk memungkinkan mereka dapat dengan segera melakukan analisis dan membuat keputusan tentang modal yang sudah, atau diinvestasikan pada perusahaan. Profesi akuntansi mengakui akan kebutuhan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Tanggungjawab ini ditunjukkan dalam pekerjaan akuntan yang selalu berusaha bekerja lebih profesional agar tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangan. Di Indonesia, dalam rangka pemberian informasi yang tepat waktu dan akurat kepada investor mengenai kondisi keuangan emiten atau perusahaan publik, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selaku lembaga yang memegang fungsi pengawasan terhadap pasar modal dan lembaga keuangan, mewajibkan kepada setiap emiten dan perusahaan publik yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan laporan keuangan tersebut kepada publik. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) dalam penyajian laporan keuangan kepada publik di Indonesia telah diatur dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan keputusan Ketua BAPEPAM No.80/PM/1996 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala. Berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-36/PM/2003, meliputi ketentuan

sebagai berikut : 1). Perusahaan wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai jenis industrinya dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan emiten atau perusahaan publik, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 2). Bagi perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan menengah atau kecil wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lainnya yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai jenis industrinya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional. 3). Bentuk dan isi neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya yang diumumkan tersebut harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada BAPEPAM. 4). Pengumuman tersebut harus memuat opini audit dari akuntan atas laporan keuangan. Bukti pengumuman tersebut harus disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu suatu perusahaan publik dalam mengumumkan laporan keuangan kepada publik turut dipengaruhi oleh lamanya jangka waktu penyelesaian audit atas laporan keuangan oleh akuntan karena laporan keuangan harus telah diaudit terlebih dahulu sebelum dapat diumumkan kepada publik.

Dalam standar pekerjaan lapangan ketiga pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, Revisi 2011), juga dinyatakan bahwa bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Hal ini berarti jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangan oleh akuntan tergantung kecukupan bukti audit kompeten yang diperoleh akuntan dalam proses audit. Apabila bukti audit kompeten dianggap belum cukup, akuntan dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian audit atas laporan keuangan. Kondisi ini akan berdampak adanya penundaan pengumuman laporan keuangan kepada publik. Oleh karena

itu, proses audit dapat menjadi suatu hambatan dalam ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Keterlambatan waktu informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Karena laporan keuangan auditan yang di dalamnya memuat informasi laba yang dihasilkan oleh perusahaan bersangkutan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor. Jadi, *audit delay* yang melewati batas waktu ketentuan BAPEPAM, tentu berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan tersebut dapat mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor. Perbedaan waktu ini sering disebut sebagai *audit delay*.

Perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam menyampaikan laporan keuangan sering mengalami keterlambatan. Pada catatan bursa periode yang berakhir 31 Desember 2012 terdapat 7 dari 21 perusahaan transportasi yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan (www.idx.co.id). Salah satunya adalah PT. Berlian Laju Tanker Tbk yang bergerak di sektor perkapalan yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Keterlambatan tersebut diakui perusahaan karena adanya utang obligasi yang membelit perusahaan terlalu besar hingga mencapai Rp. 22 triliun. Berawal pada tahun 2007 dimana saat itu angka pada BDI (*Baltic Dry Index*) yaitu angka yang menggambarkan perkembangan harga rata-rata sewa kapal yang digunakan untuk mengangkut logistik, komoditas dan lain-lain, termasuk untuk perdagangan antar negara (ekspor-impor) di seluruh dunia sedang baik. Saat itu BLTA mengambil banyak utang untuk ekspansi usaha seluas-luasnya. Pada akhir tahun 2007, BLTA tercatat memiliki total kewajiban senilai US\$ 1.8 Milyar. Pada tahun 2008 saat terjadi krisis global yang membuat angka BDI turun drastis dan tidak kunjung membaik hingga saat ini, dimana saat itu BLTA sudah memiliki hutang-hutang yang sangat besar, kemudian BLTA sedang melakukan restrukturisasi utang yang

mengakibatkan pihak auditor eksternal membutuhkan perpanjangan waktu untuk dapat menilai risiko audit sepenuhnya. Atas terlambatnya publikasi laporan keuangan, maka perusahaan dikenakan denda sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah), namun perusahaan tetap terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan dan tidak juga membayarkan denda, akhirnya pihak Bursa Efek pun melakukan suspensi terhadap perusahaan (www.hukumonline.com).

Atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut dikenai sanksi sebagaimana telah ditetapkan pada Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00085/BEI/10-2011, sanksi-sanksi tersebut adalah sebagai berikut : 1). Teguran tertulis. 2). Peringatan tertulis. 3). Denda sebanyak-banyaknya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). 4). Larangan sementara untuk melakukan aktivitas perdagangan di Bursa (suspensi) bagi anggota Bursa Efek. 5). Pencabutan persetujuan memperdagangkan efek tertentu. 6). Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa Efek. Perusahaan-perusahaan sektor transportasi yang terlambat menyerahkan laporan keuangan telah dikenakan sanksi, dan 6 dari 7 perusahaan dikenakan sanksi hingga ke sanksi suspensi. Hal ini terjadi akibat keterlambatan para perusahaan dalam menyerahkan laporan keuangan yang kemudian ditindaklanjuti oleh BEI dengan sanksi peringatan beserta denda, tetapi perusahaan menunda atau tidak membayar sanksi denda tersebut hingga akhirnya dikenakan sanksi berupa suspensi. Kebijakan suspensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap investor. Sebab, yang paling merasakan dampak dari tindakan suspensi terhadap Perusahaan Efek Anggota Bursa (PE AB) adalah PE AB itu sendiri. PE AB tidak bisa melakukan kegiatan bisnisnya sehingga tidak menerima pendapatan dari jasa transaksi efek. Jika hal ini berlarut-larut, tentu akan berakibat fatal bagi PE AB yang bersangkutan. Dengan adanya sanksi suspensi, diharapkan ada efek jera pada PE AB yang bersangkutan sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengelola perusahaan ke depan dan tidak mengulangi kesalahan sehingga kegiatan operasional PE AB berada di jalur yang benar (www.economy.okezone.com).

Menurut Dyer *and* McHugh (1975:206) dalam penelitian Astini dan Wirakusuma (2013), *audit delay* adalah lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan. Apabila laporan keuangan disajikan terlambat, maka informasi yang terkandung didalamnya menjadi tidak relevan dalam mengambil keputusan.

Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Rachmawati (2008), melakukan penelitian mengenai *audit delay* terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di New Zealand Stock Exchange pada tahun 1987 dan tahun 1988. Hasil penelitian 1987 menyimpulkan bahwa lamanya audit delay memiliki hubungan positif dengan perusahaan yang memiliki kerugian, perusahaan yang memiliki *extraordinary item*, perusahaan yang memperoleh opini audit selain *unqualified opinion*, perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil, dan perusahaan yang dikendalikan oleh manajer. Kualitas auditor dapat ditinjau dari apakah Kantor Akuntan Publik berafiliasi dengan *the big four* atau *non big four*. Sementara hasil 1988 penelitian terhadap perusahaan sampel menunjukkan bahwa lamanya *audit delay* memiliki hubungan positif dengan perusahaan yang mengalami kerugian, perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil, perusahaan dalam industri nonkeuangan, dan perusahaan dengan proporsi *debt-to-total-assets* yang besar.

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dari besarnya total *asset* atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Menurut Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Febrianty (2011), perusahaan yang memiliki aset yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staff akuntansi dan sistem informasi yang lebih canggih, maka hal ini memungkinkan perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat. Hasil penelitian Rachmawati (2008) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* yang berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin pendek *audit delay* dan sebaliknya, semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin panjang audit delay. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar biasanya memiliki sistem pengendalian internal yang baik, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Febrianty (2011) dan

Indriyani (2012). Namun hal ini berbeda pendapat dari hasil penelitian Lianto dan Kusuma (2010), yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, yang berarti bahwa karena semua perusahaan senantiasa diawasi oleh para investor, regulator, dan berbagai pihak lain, sehingga setiap perusahaan dituntut untuk dapat segera menyelesaikan pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan.

Hasil penelitian Febrianty (2011), menunjukkan bahwa tingkat *leverage* dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap jangka waktu perusahaan mempublikasikan laporan keuangan hasil auditan, tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan sedang dalam kesulitan keuangan. Tingkat *leverage* diukur menggunakan *Debt Ratio*, karena menurut Wiston & Brigham (2009:302), semakin tinggi hasil persentasenya, maka cenderung semakin besar risiko keuangannya bagi kreditur maupun pemegang saham. Perusahaan akan menghadapi kesulitan bila meminjam dana tambahan. Biasanya perusahaan akan mengurangi risiko dengan memundurkan publikasi laporan keuangannya dan mengulurkan waktu dalam pekerjaan auditnya, pernyataan ini sejalan dengan penelitian Angruningrum (2013), dan Lianto dan Kusuma (2010). Berbeda dengan penelitian Astini (2013) yang menyatakan bahwa tingkat *leverage* tidak berpengaruh terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan, perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang rendah cenderung ingin segera mempublikasikan laporan keuangannya, sebab hal tersebut merupakan kabar baik yang akan mempertinggi nilai perusahaan di mata pihak-pihak berkepentingan.

Houssain dan Taylor (1998) dalam Febrianty (2011), menyebutkan bahwa kualitas auditor dapat diketahui dari besarnya perusahaan audit yang melaksanakan pengauditan laporan keuangan tahunan. KAP besar dalam hal ini *the big four* cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan tugas audit dibandingkan dengan non *big four* dikarenakan reputasi yang harus mereka jaga. KAP *big four* umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar (kompetensi, keahlian, kemampuan auditor, fasilitas, sistem, prosedur pengauditan yang digunakan, pelatihan dan pengakuan internasional), sehingga dapat dikatakan kualitas KAP

big four lebih berkualitas dibanding KAP *non big four*. Dalam penelitian Iskandar dan Trisnawati (2010), bahwa besarnya KAP berpengaruh terhadap *audit delay* karena auditor yang mempunyai reputasi yang baik akan memberikan kualitas pekerjaan audit yang efektif dan efisien sehingga audit dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Hal ini tidak sama seperti yang diungkapkan Febrianty (2011), dan Puspitasari dan Nurmalasari (2012) yang menunjukkan bahwa kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, karena semakin baik kualitas KAP maka KAP tersebut belum memberikan jaminan terhadap kualitas audit yang dilakukan dengan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, penulis termotivasi untuk menganalisa lebih jauh mengenai pengaruh ukuran perusahaan, tingkat *leverage*, dan kualitas Kantor Akuntan Publik terhadap lamanya *audit delay* pada perusahaan sektor transportasi. Penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat *Leverage* dan Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap *Audit Delay* Pada Perusahaan Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012”**.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ukuran perusahaan, tingkat *leverage*, kualitas KAP dan *audit delay* pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI periode 2008-2012?
2. Apakah ukuran perusahaan, tingkat *leverage*, dan kualitas KAP secara simultan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI periode 2008-2012?
3. Apakah ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI periode 2008-2012?

4. Apakah tingkat *leverage* secara parsial berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI periode 2008-2012?
5. Apakah kualitas Kantor Akuntan Publik secara parsial berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI periode 2008-2012?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, tingkat *leverage*, dan kualitas KAP berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI periode 2008-2012
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan, tingkat *leverage*, dan kualitas KAP secara simultan terhadap lamanya *audit delay* pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI periode 2008-2012
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI periode 2008-2012
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh tingkat *leverage* secara parsial terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI periode 2008-2012
5. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kualitas KAP secara parsial terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI periode 2008-2012

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* seperti ukuran perusahaan, *tingkat leverage* dan kualitas Kantor Akuntan Publik pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari penulis selama perkuliahan.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian serupa yang hendak dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit melalui pengelolaan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* sehingga lamanya *audit delay* dapat dikurangi dan dapat meningkatkan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan oleh perusahaan publik.

2. Bagi Perusahaan Publik

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perusahaan publik dalam usaha meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada publik.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab tinjauan dan lingkup penelitian berisikan landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan dasar bagi peneliti, penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang pembahasan dan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan dan menganalisis hasil penelitian tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian yang ada, dan saran-saran yang mungkin dapat dipergunakan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.